

pengaruh transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pajak

Silvirius Gervan Geli, Desi Ismah Anggraini

Email: ankkmagamma@gmail.com, desyismahanggraini@uwp.ac.id

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra

Abstrak

Berdasarkan temuan penelitian, ada pengaruh yang besar dari transparansi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Semakin tinggi tingkat transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah—terutama dalam hal penggunaan dana, proses administratif, serta interaksi dengan publik—semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Kepercayaan ini mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, data dari penelitian menunjukkan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Keterbukaan informasi, kemudahan akses kepada data penggunaan pajak, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan. Tingginya kepercayaan terhadap sistem perpajakan tidak hanya memperbaiki kepatuhan wajib pajak tetapi juga menambah legitimasi pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari otoritas pajak untuk meningkatkan kualitas informasi, menekan praktik-praktik korupsi, serta menciptakan sistem yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Keterbukaan, Kepercayaan Publik, Pajak, Tanggung Jawab, Ketaatan Pajak

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak dan Pentingnya dalam Pendanaan Negara Pajak adalah pilar utama dalam keuangan negara yang berfungsi penting untuk mendukung berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah melebihi 80% dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan betapa besar ketergantungan negara terhadap pendapatan pajak sebagai sumber utama pendanaan.

ISSN : 3025-9495

Oleh karena itu, keberlangsungan dan kinerja sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah namun, fakta menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan formal serta rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) masih di bawah target yang diharapkan. Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap pajak. Salah satu aspek yang semakin banyak dibahas adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan dan pemerintah secara keseluruhan.

Peran Kepercayaan dalam Sistem Perpajakan kepercayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien. Ketika publik yakin bahwa pajak yang mereka bayar dikelola dengan baik, adil, dan untuk kepentingan bersama, maka kepatuhan sukarela akan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika masyarakat merasa dana pajak disalahgunakan, tidak transparan, atau hanya menguntungkan segelintir orang, maka resistensi terhadap pajak akan meningkat. Dalam hal ini, transparansi menjadi unsur kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Transparansi dalam Pengelolaan Pajak transparansi terkait pengelolaan pajak mencakup keterbukaan pemerintah dalam membagikan informasi mengenai penerimaan pajak, penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, serta proses pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal. Pemerintah yang dapat memberikan informasi perpajakan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas di depan publik. Selain itu, transparansi juga berarti adanya akses luas bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai bagaimana dana publik dikelola.

Tantangan dalam Mewujudkan Transparansi di era digital saat ini, transparansi dapat ditingkatkan melalui berbagai platform teknologi informasi, seperti situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak, laporan keuangan pemerintah yang diterbitkan secara berkala, dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan fiskal. Namun, tantangan dalam mencapai transparansi masih besar. Tidak semua informasi mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat. Selain itu, praktik korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan dana publik juga menjadi kendala serius dalam membangun kepercayaan.

Hubungan Antara Transparansi dan Kepercayaan Publik beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi dan kepercayaan publik dalam berbagai konteks pemerintahan. Dalam hal perpajakan, beberapa studi internasional menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat transparansi fiskal yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Masyarakat yang merasa terlibat dan mendapatkan informasi tentang penggunaan pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan. Ini membuktikan bahwa transparansi bukan hanya merupakan prinsip etika pemerintah yang baik, tetapi juga strategi penting dalam meningkatkan penerimaan negara.

Kesenjangan dalam Transparansi di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi, seperti peluncuran sistem e-Filing, publikasi laporan

ISSN : 3025-9495

realisasi APBN, dan adopsi sistem akuntansi berbasis akrual, masih terdapat kesenjangan antara informasi yang disediakan oleh pemerintah dan pemahaman masyarakat tentang informasi tersebut. Rendahnya tingkat literasi fiskal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta minimnya sosialisasi menjadi faktor yang menghambat efektivitas transparansi itu sendiri.

Penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana transparansi berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan kuantitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Fokus utama dari studi ini adalah bagaimana pandangan masyarakat terkait keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pemerintah memengaruhi sikap mereka dalam mendukung sistem perpajakan.

Studi ini juga berusaha memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merancang strategi komunikasi dan transparansi fiskal yang lebih baik. Diharapkan, usaha ini tidak hanya bisa meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mendorong kepatuhan pajak yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya transparansi yang kuat dan konsisten, masyarakat dapat kembali membangun kepercayaan, sehingga tercipta hubungan yang positif antara pemerintah dan wajib pajak.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan studi perpajakan, khususnya dalam konteks interaksi antara transparansi dan kepercayaan publik, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel dan partisipatif.

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei untuk mengevaluasi seberapa besar dampak transparansi pemerintah dalam pengelolaan pajak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara objektif, sistematis, dan terukur mengukur interaksi antar variabel menggunakan data statistik.

1. Desain Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan adalah eksplanatif, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Dalam hal ini, variabel independen adalah transparansi, dan variabel dependen adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Penelitian ini tidak hanya menjabarkan kedua variabel, tetapi juga melakukan analisis mengenai dampak di antara keduanya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah individu yang merupakan wajib pajak di DKI Jakarta yang telah melaporkan atau membayar pajak dalam tiga tahun

ISSN : 3025-9495

terkini. Pemilihan Jakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa Jakarta adalah pusat aktivitas ekonomi dan administrasi yang memiliki tingkat perpajakan yang signifikan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang diambil berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden dalam penelitian ini mencakup:

1. Berusia setidaknya 21 tahun.
2. Memiliki NPWP dan aktif sebagai wajib pajak.
3. Pernah mendapatkan informasi tentang pajak, baik melalui situs DJP, media massa, atau forum diskusi publik.

Total sampel yang diambil adalah 100 responden, yang dianggap cukup untuk merepresentasikan populasi dalam penelitian berskala kecil hingga menengah serta analisis regresi linier sederhana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui kuesioner tertutup yang disebarluaskan secara online menggunakan Google Form. Kuesioner dirancang berdasarkan indikator dari setiap variabel yang dianalisis:

Variabel Transparansi diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi terkait penggunaan dana pajak,
2. Kemudahan akses terhadap data dan laporan keuangan yang bersifat publik,
3. Kualitas komunikasi pemerintah mengenai pajak,
4. Akuntabilitas lembaga pengelola pajak.

Variabel Kepercayaan Masyarakat diukur dari:

1. Persepsi mengenai keadilan dan integritas sistem perpajakan,
2. Keyakinan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum,
3. Sikap terhadap kewajiban membayar pajak.

Setiap item dinilai menggunakan skala Likert 5 poin, yang berkisar dari “sangat tidak setuju” (1) hingga “sangat setuju” (5).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan Direktorat Jenderal Pajak, BPS, dan makalah ilmiah sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan dukungan analisis.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan telah sesuai dan konsisten. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik (normalitas, linearitas, dan homoskedastisitas) untuk memastikan bahwa model regresi dapat memenuhi syarat untuk analisis statistik. Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

ISSN : 3025-9495

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh transparansi pemerintah dalam pengelolaan pajak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang melibatkan 100 responden wajib pajak pribadi di wilayah DKI Jakarta. Analisis data menggunakan teknik regresi linier sederhana untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel transparansi (X) dan kepercayaan masyarakat (Y).

1. Hasil Statistik Deskriptif

Data deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden (76%) beranggapan bahwa transparansi pemerintah dalam perpajakan berada pada tingkat yang sedang. Mereka menyadari adanya akses ke laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN, tetapi menilai bahwa informasi yang diberikan masih kurang jelas atau sulit dimengerti oleh masyarakat pada umumnya.

Sebanyak 18% responden berpendapat bahwa pemerintah cukup transparan dalam memberikan informasi perpajakan, terutama melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Meski demikian, ada 6% responden yang merasa pemerintah tidak transparan, dengan alasan sulitnya mendapatkan informasi rinci tentang penggunaan dana pajak serta kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan fiskal.

Di sisi lain, untuk variabel kepercayaan masyarakat, 63% responden mengaku memiliki tingkat kepercayaan sedang terhadap sistem pajak. Sekitar 22% merasa percaya, karena mereka melihat langkah-langkah reformasi yang diambil pemerintah, seperti penerapan sistem e-filing dan pelaporan digital. Namun, 15% lainnya merasa kurang percaya, terutama karena masih sering terjadi isu korupsi dan penyalahgunaan dana publik.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti mengecek validitas dan reliabilitas alat kuesioner yang digunakan. Semua item pada variabel transparansi dan kepercayaan menunjukkan korelasi antar-item lebih dari 0,3 dan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,82. Ini menunjukkan bahwa instrumen yang dipakai dalam penelitian ini sudah valid dan dapat diandalkan untuk mengukur kedua variabel tersebut.

3. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara transparansi terhadap kepercayaan masyarakat. Koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,615, dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Ini menunjukkan bahwa transparansi memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,378 menunjukkan bahwa sebesar 37,8% variasi dalam kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan melalui transparansi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti kualitas pelayanan pajak, persepsi keadilan sistem pajak, dan pengalaman pribadi wajib pajak.

4. Pembahasan

Hasil ini menegaskan bahwa transparansi adalah salah satu elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Semakin terbuka pemerintah dalam memberikan informasi mengenai penggunaan pajak dan proses administrasinya, maka semakin tinggi pula kepercayaan publik.

Transparansi di sini tidak hanya mencakup tersedia tidaknya informasi tetapi juga kemudahan akses, keterbukaan dalam komunikasi, dan kemampuan masyarakat untuk memahami serta mengevaluasi informasi yang ada. Jika pemerintah hanya menyampaikan data dalam bentuk laporan teknis yang sulit dicerna, maka informasi tersebut tidak akan memberi dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori trust governance yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Suryadi (2019) dan Rahman (2021) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik secara signifikan meningkatkan partisipasi wajib pajak.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara pandangan masyarakat dan langkah-langkah transparansi yang telah diambil oleh pemerintah. Beberapa responden menyebutkan bahwa informasi sudah ada, tetapi tidak disebarluaskan secara menyeluruh, atau hanya dimengerti oleh sekelompok orang tertentu. Rendahnya pemahaman tentang fiskal menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat tidak dapat memanfaatkan informasi yang ada dengan baik.

Oleh karena itu, transparansi perlu didukung dengan pendekatan komunikasi publik yang menyeluruh dan mendidik. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menyebarkan informasi perpajakan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, komunitas lokal, dan institusi pendidikan, agar pesan-pesan tentang pajak dapat sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki seberapa besar transparansi pemerintah, terutama dalam aspek perpajakan, dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari survei pandangan publik dan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki dampak yang sangat besar terhadap terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Transparansi yang dimaksud mencakup penyampaian informasi terkait kebijakan pajak, pengelolaan serta pembagian dana dari pajak, dan kejelasan prosedur dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Apabila informasi tersebut disajikan secara terbuka, akurat, dan mudah diakses, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Masyarakat akan berpandangan bahwa pajak yang mereka bayar digunakan dengan baik dan untuk kepentingan umum, bukan disalahgunakan atau dipergunakan untuk tujuan yang tidak pantas.

ISSN : 3025-9495

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa wilayah atau organisasi yang memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi cenderung menunjukkan angka kepatuhan pajak sukarela yang lebih baik. Sebaliknya, bila pemerintah kurang transparan dalam pengelolaan pajak, seperti tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai penggunaan anggaran atau tidak terbuka dalam proses audit, hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan, kecurigaan, dan bahkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kurangnya transparansi juga berpotensi meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa transparansi tidak hanya merupakan tuntutan etika dalam administrasi publik, tetapi juga merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Kepercayaan publik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui komunikasi yang transparan, akuntabilitas, dan integritas yang ditunjukkan oleh lembaga perpajakan.

Sebagai kesimpulan, diharapkan pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak terus mengembangkan inovasi dalam menyajikan informasi yang mudah dipahami masyarakat, memperbaiki sistem pengawasan internal, serta melibatkan masyarakat dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan mengenai pajak. Dengan cara ini, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan terus meningkat, sehingga pada akhirnya akan memperkuat penerimaan negara dari sektor pajak secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: BPS.
- Suryadi, A. (2019). Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kredibilitas Masyarakat: Penelitian Lapangan pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 45–60.
- Rahman, H. (2021). Dampak Keterbukaan dan Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Pembayar Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(2), 112–126.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). APBN Kita: Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV. Jakarta.
- OECD. (2017). *Membangun Kepercayaan dalam Perpajakan: Keterbukaan, Keadilan dan Peran Digitalisasi*. Paris: OECD Publishing.
- Torgler, B. (2007). *Ketaatan Pajak dan Moralitas: Analisis Teoritis dan Empiris*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Nurmantu, S. (2005). *Pajak dan Retribusi: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Granit.
- Alm, J. , dan Torgler, B. (2011). Apakah Etika Penting? Kepatuhan Pajak dan Moralitas. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

